

“Kalau Quran sudah menyebutkan 'kerusakan di darat dan laut karena perbuatan manusia' 14 abad lalu, apa yang lebih dulu mati — alam atau definisi 'alami'?

Diskusi terbuka. Boleh kamu setuju, boleh kamu bantah — yang penting kamu pikir.

Pekan ini sebuah kabar pendek tentang Pantura Jawa membawa narasi yang memprovokasi: yang selama ini disebut "bencana alam" sebagian besar adalah konsekuensi struktural dari keputusan-keputusan manusia kolektif — penebangan mangrove, konversi tata-ruang, perizinan industri tanpa kajian dampak lingkungan yang

serius, dan reklamasi yang mengubah hidrodinamika pesisir. Istilah "alami" perlahan menjadi mantra yang menjauhkan tanggung jawab dari aktor-aktor yang sebenarnya berpengaruh. Bagi mahasiswa yang hidup di era Anthropocene — istilah geologi untuk era ketika aktivitas manusia menjadi gaya geologis dominan — kerangka tradisional "alam versus manusia" mulai kehilangan ketajamannya. Menariknya, tradisi Islam sudah lama meletakkan kerangka yang lebih dewasa: manusia bukan penonton alam, melainkan *khalifah* bumi yang tindakannya membentuk kondisi yang ia diami sendiri.

Lensa pertama — ekologi sains. Bencana hidrometeorologi seperti banjir, longsor, dan abrasi yang dulu dipersepsikan natural kini dipahami sebagai hasil interaksi kompleks antara fenomena alam dan perubahan tutupan lahan plus tata-ruang manusia. Mangrove yang ditebang melemahkan tembok abrasi; reklamasi pantai mengubah hidrodinamika; emisi global mempercepat kenaikan muka laut. Dikotomi "alam versus manusia" menjadi obsolete; hampir semua bencana saat ini adalah bencana hibrida. Celah lensa ini: ia bisa melebih-lebihkan determinasi manusia dan melupakan fenomena alam yang memang independent, seperti tektonik. Pertanyaan yang muncul: di mana garis tanggung jawab manusia sebenarnya berhenti?

Lensa kedua — ekonomi politik. Keputusan tata-ruang tidak pernah netral; ia mencerminkan distribusi kekuasaan antara pengembang, pemerintah daerah, dan masyarakat adat yang bobot suaranya jauh dari setara. Pantura terbangun lewat keputusan yang melepaskan beberapa pihak dari konsekuensi — pengembang melenggang, masyarakat pesisir menanggung. Implikasinya: solusi tidak hanya teknis seperti tanam mangrove, melainkan struktural — audit perizinan, transparansi AMDAL, redistribusi suara dalam musyawarah tata-ruang. Celah lensa ini: ia bisa men-trap diskusi ke wilayah politik abstrak tanpa praktik nyata.

Pertanyaan yang muncul: bagaimana praktik individual menyentuh struktur tanpa kehilangan koneksi ke realitas keseharian?

Lensa ketiga — antropologi adat. Masyarakat adat lokal punya etika lingkungan yang sudah teruji lama — kearifan *sasi* di Maluku, hutan adat Dayak, sistem *subak* Bali — yang sering disepelekan modernitas sebagai "primitif". Kasus Sungai Digul pekan ini menyentuh kerangka ini: masyarakat adat di Papua punya pengetahuan turun-temurun tentang ekosistem itu, yang dipinggirkan saat investasi besar masuk. Dakwah lingkungan yang sehat tidak cukup mengimpor konsep western seperti *sustainability* atau ESG; ia juga restorasi tradisi lokal yang sudah punya jawaban dalam bahasanya sendiri. Celah lensa ini: romantisasi tradisi lokal bisa mengabaikan kekurangannya. Pertanyaan yang muncul: bagaimana memilah yang masih relevan dari yang harus diperbarui?

Lensa keempat — teologi khilafah-bumi. Tradisi Islam meletakkan manusia sebagai *khalifah* (**QS. Al-Baqarah: 30**) — pemegang amanah, bukan pemilik. Konsep ini punya implikasi konkret: ekstraksi tanpa perawatan adalah pelanggaran amanah; eksploitasi atas masyarakat adat adalah pelanggaran adab amanah; pembiaran ekosistem yang rusak adalah pelanggaran istikhlaf. Kitab Bidayatul Hidayah memuat bab *adab al-batn* — etika konsumsi sebagai latihan pengendalian diri yang ironisnya beresonansi dengan agenda anti-konsumerisme modern. **QS. Ar-Rum: 41** sudah menyebutkan "telah tampak kerusakan di darat dan laut karena perbuatan tangan manusia" jauh sebelum istilah Anthropocene lahir. Kerangka teologis ini menawarkan vocabulary yang lebih lama dan lebih dalam dari "sustainability". Celah lensa ini: efektif terutama bagi yang menerima otoritas teologis. Pertanyaan yang muncul: bagaimana vocabulary ini ditawarkan dalam diskusi sekuler tanpa kehilangan kedalamannya?

Solusi praktis untuk mahasiswa hari ini berlapis. Di kos: pilah sampah, bawa tumbler dan tas kain, tolak plastik sekali pakai sebagai habit harian. Di kampus: kalau ada UKM lingkungan, ikut serta; kalau belum ada, inisiasi; kalau ada peluang skripsi atau riset terkait lingkungan,

prioritaskan dibanding topik yang hanya repeat literatur. Di magang: di perusahaan, lakukan audit kritis terhadap klaim *sustainability* — apakah nyata atau *greenwashing*?; di NGO, hindari trap mengimpor konsep tanpa kontekstualisasi lokal. Di pulang kampung: tanyakan ke orang tua dan tokoh adat — kearifan lokal lingkungan apa yang masih hidup, apa yang sudah hilang, dan kenapa? Dokumentasikan, walau hanya di catatan pribadi. Di BEM atau LDK: agendakan diskusi lingkungan minimal sekali per semester; undang aktivis lokal yang tangannya kotor bekerja di lapangan, bukan hanya pembicara viral nasional.

"Bencana alam" makin sulit dipisahkan dari "bencana manusia"; garis antara keduanya menipis seiring jejak peradaban memperdalam dirinya di dalam tanah dan laut. Mahasiswa muslim hari ini bukan diminta menjawab dikotomi itu, melainkan diminta hidup dengan kesadaran bahwa setiap keputusan konsumsi, lokasi tinggal, dan engagement organisasi adalah ekspresi khilafah-bumi. Tradisi sudah menyediakan vocabulary yang utuh. Pertanyaannya cuma: maukah generasi ini menggunakannya secara serius, atau membiarkannya menjadi dekorasi sambil mengimpor istilah dari tempat lain yang belum tentu lebih dalam?

| Pertanyaan

Q · 01

"Sebagai mahasiswa biasa, tindakan saya kecil banget — beneran ngaruh?"

A

Sebagian valid — dampak personal memang kecil dalam skala iklim global. Tetapi setiap struktur sistemik dibangun dari habit personal yang ter-aggregate. Kalau delapan juta mahasiswa Indonesia menolak plastik sekali pakai konsisten satu tahun, dampaknya ratusan juta lembar plastik per tahun. Yang lebih penting: habit personal melatih otot moral untuk advokasi politik yang lebih besar nantinya. Tanpa habit pribadi yang nyata, advokasi terdengar hollow dan mudah dipatahkan lawan diskusi.

Q · 02

"Tradisi Islam versus sustainability modern — mana yang dipake?"

A

Tidak harus pilih salah satu. Tradisi Islam dengan konsep *khilafah*, *mizan*, dan *amanah* memberi vocabulary teologis-spiritual yang menjawab "kenapa kita peduli". Sustainability modern dengan tools seperti *life cycle assessment*, ESG, dan *carbon accounting* memberi jawaban "bagaimana mengukur dan menjalankannya". Kombinasi keduanya lebih kuat dibanding salah satu sendirian. Yang gagal di kedua sisi: pakai satu tanpa yang lain, atau menjadikan salah satunya kosmetik untuk mempercantik yang sebenarnya tidak berubah.

Q · 03

"Pemerintah harus bertindak. Kenapa harus mahasiswa?"

A

Mahasiswa adalah pembentuk masa depan kebijakan, bukan pengganti pemerintah. Generasi yang hari ini punya pemahaman dalam tentang ekologi adalah generasi yang sepuluh hingga dua puluh tahun mendatang menjadi pengambil kebijakan, peneliti, jurnalis, dan pelaku bisnis. Kalau tidak ada generasi muda yang meragukan, mendokumentasi, dan mengadvokasi sekarang, kebijakan masa depan tetap **business-as-usual**. Tugas mahasiswa bukan menggantikan negara; ia memastikan pasokan sumber daya manusia kritis untuk struktur yang akan datang.

Q · 04

"Saya mahasiswa STEM, sustainability bukan bidang saya. Apa kontribusi?"

A

Justru bidang STEM yang paling kunci. Engineer yang paham ekologi merancang infrastruktur tanpa kerusakan struktural yang baru terlihat dua puluh tahun kemudian. Kimia, biologi, fisika, arsitektur, teknik sipil, dan ilmu material — semua punya dimensi sustainability yang menunggu integrasi dalam praktek profesional. Jangan menunggu menjadi "spesialis lingkungan" baru terlibat; integrasikan kesadaran ekologis dalam disiplin sendiri sejak tugas mata kuliah pertama. Itu jauh lebih berdampak dibanding karir berganti haluan total.

"Kearifan lokal seringkali primitif dan tidak efisien. Kenapa kita harus restorasi?"

A

"Tidak efisien" menurut standar modern — yang mengutamakan ekstraksi cepat dan akumulasi kapital — bukan sama dengan "tidak berfungsi".

Banyak kearifan adat seperti *sasi* Maluku dan hutan adat Dayak sudah teruji dalam *timescale* lima ratus tahun lebih, jauh lebih lama dari sustainability modern yang umurnya baru sekitar enam puluh tahun. Yang tampak tidak efisien dalam jangka pendek seringkali justru paling sustainable dalam jangka panjang. Restorasi kearifan lokal bukan nostalgia; ia bentuk *humility* teknis yang sehat.